



**PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

FEBY AFRILIA UTAMI
2320112027

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing :

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**(Feby Afrilia Utami, 2320112027, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 147 halaman, 2026)**

ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan hukum dikarenakan rumusan norma yang bersifat multitafsir dan menjadi objek pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya dalam ruang digital. Padahal, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28 UUD 1945. Sehubungan dengan itu fokus masalah yang diteliti. Pertama yaitu, bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin dalam UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam UU ITE? Kedua, bagaimana MK menafsirkan batas hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam pengujian UU ITE? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam UU ITE serta menganalisis penafsiran MK terkait batas hak kebebasan berpendapat dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian yang telah diperoleh, bahwa pada prinsipnya MK mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental, namun bukan hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut dimungkinkan sepanjang ditetapkan dengan undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa norma-norma dalam UU ITE harus ditafsirkan secara proporsional, dan tidak sewenang-wenang guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi membatasi atau mengancam kebebasan berpendapat.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, UUD 1945, UU ITE, Mahkamah Konstitusi

THE CONSTITUTIONAL COURT'S INTERPRETATION OF THE RESTRICTIONS ON FREEDOM OF SPEECH IN THE ELECTRONIC TRANSACTION INFORMATION LAW

(Feby Afrilia Utami, 2320112027, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 147 Pages, 2026)

ABSTRACT

The Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), in practice often raises legal issues due to the formulation of norms and its frequent appeal to the Constitutional Court. This situation raises concerns about excessive restrictions on freedom of expression, particularly in the digital space. In fact, freedom of expression, assembly, and association are human rights expressly guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution. In this regard, the focus of this study is : First, how is the freedom of expression guaranteed in the 1945 Constitution further regulated in the ITE Law? Second, how does the Constitutional Court interpret the limits of the rights to freedom of association, assembly, and expression in the judicial review of the ITE Law? The purpose of this study is to analyze the provisions on freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution as further regulated in the ITE Law and to analyze the Constitutional Court's interpretation of the limits of the right to freedom of expression in the ITE Law. This study uses normative or doctrinal legal research or secondary data. The results of the study indicate that, in principle, the Constitutional Court recognizes freedom of expression as a fundamental constitutional right, but not an absolute right. Restrictions on these freedoms are permitted as long as they are established by law and aimed at protecting the rights and freedoms of others and maintaining public order in a democratic society. The Constitutional Court also explained that the norms in the ITE Law must be interpreted proportionally and not arbitrarily to prevent abuse of power that could potentially limit or threaten freedom of expression.



Keywords : Freedom of Expression, 1945 Constitution, Electronic Information and Transactions law, Constitutional Court